BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA

Fajarwati

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh

fajar120788@gmail.com

Abstract

Every married couple desires a harmonious, loving, and compassionate household. To achieve such a family, premarital counseling is necessary. The goal of marital counseling is to equip the bride and groom to understand their rights and responsibilities. It is crucial for the bride and groom to receive counseling to prepare themselves psychologically for marital conflict. When problems arise in the marriage, each partner is able to think rationally and make wise decisions.

Keyword: *Guidance, Marriage, Religious Affairs Office*

Abstrak

Setiap pasangan suami-istri menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang demikian dibutuhkan bimbingan pranikah. Tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk membekali calon pengantin supaya masing-masing pengantin mengetahui hak dan kewajibannya. Penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan bimbingan guna mempersiapkan mental psikologis dalam menghadapi konflik rumah tangga. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga, setiap pasangan mampu berpikir secara rasional dan mampu mengambil keputusan secara bijak.

Kata Kunci: Bimbingan, Perkawinan, Kantor Urusan Agama

PENDAHULUAN

Pernikahan secara bahasa berasal dari kata *An-nikah* dan *Al-tazwij* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama, atau bersetubuh. Makna pernikahan secara istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt. (Soemiyati, 1989).

Adapun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

Selanjutnya tujuan dari perkawinan dalam rangka mendapatkan keturunan (*Li tanasalu*) dan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan (*li taskunu*). Dalam praktiknya, kehidupan perkawinan yang telah dibina tidak selamanya akan berjalan sesuai dengan

apa yang diinginkan, yang selalu mengharapkan kehidupan rumah tangga bahagia, damai, dan tentram. Adakalanya berbagai macam konflik akan mengguncang kehidupan dalam rumah tangga, dimana konflik itu terjadi baik antara suami istri ataupun yang lainnya. Terkadang konflik yang terjadi tersebut bisa diselesaikan baik-baik oleh kedua belah pihak saja, terkadang juga tidak bisa diselesaikan sehingga menimbulkan perselisihan yang berujung pada rusaknya perkawinan atau perceraian.

Upaya meminimalisir kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian yang terjadi, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah menerapkan program bimbingan perkawinan yang wajib bagi semua pasangan yang akan menikah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pembentukan keluarga yang sejahtera. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pada program ini. Bimbingan perkawinan bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai manajemen keluarga yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan berkeluarga, mereka dapat menciptakan keharmonisan serta menjadi keluarga yang penuh cinta dan kasih, sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Dede Nurul Qomariah, 2021)

Berkaitan dengan uraian di atas, jika penulis mengamati dalam kehidupan rumah tangga hari ini, banyak sekali terjadi konflik dalam rumah tangga, dimana konflik itu berujung pada perceraian, di antara konflik rumah tangga yaitu: perkara ekonomi, perkara pihak ketiga baik priwil maupun mertua, perjudian online, KDRT. Hari ini perceraian yang terjadi masih banyak dan pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Banyak pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing, karena minimnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan dan tujuannya. Oleh sebab itu penelitian tentang bimbingan perkawinan sangat dibutuhkan.

Perlu diketahui bahwa bimbingan perkawinan merupakan sebuah kegiatan pembekalan secara instan, yaitu 16 jam pelajaran atau setara dengan dua hari aktif jam pelajaran. Bimbingan Perkawinan ini juga merupakan bimbingan pra nikah yang meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Menurut penulis bimbingan perkawinan layak untuk dikaji lebih mendalam.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu suatu metode yang pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 2007). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam (Masyhuri, 2008). Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang teoritis melalui kepustakaan dengan cara membaca buku-buku, jurnal, artikel, kitab-kitab, dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun buku yang dipakai adalah *Fiqh Munakahat*.

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Nikah menurut bahasa berasal dari kata نکح - ينكح - نکاحا yang berarti kawin, bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Menurut istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri. Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian kawin. (Lili Rasjidi, 1982)

Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu menurut Zahry Hamid yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. (Abd. Shomad, 2012)

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa "*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*". (Simanjutak, 2015)

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga. Hukum melakukan pernikahan jumbuh fuqaha berpendapat bahwa pada asalnya hukum melakukan perkawinan adalah sunnah dan ini berlaku secara umum. (Amir Syarifuddin, 2003), Ini berdasarkan dari banyaknya perintah Allah dan Nabi yang memerintahkan untuk melakukan perkawinan.

Firman Allah Swt. :

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ...

Artinya:

“...Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat...”.
(QS. An-Nisa’: 3)

Hal tersebut juga tertuang secara jelas dalam hadis Nabi Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

Berdasarkan Al-Qur’an maupun As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan perkawinan bagi kaum muslimin yang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya maka perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh maupun mubah. Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan secara terperinci terkait hukum melakukan pernikahan :

1. Wajib.

Menikah menjadi wajib apabila seorang pria yang dipandang dari sudut fisik sudah sangat mendesak untuk menikah, sedang dari sudut biaya hidup sudah mampu dan mencukupi, sehingga jika dia tidak menikah dikhawatirkan dirinya akan terjerumus dalam lembah perzinaan, maka wajib baginya untuk menikah. Begitu juga halnya dengan seorang wanita yang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan orang jahat jika ia tidak menikah, maka wajib baginya untuk menikah. ((M. Idris Ramulyo, 1996)

Terkait hukum wajibnya menikah, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Imam Qurtuby, bahwa orang bujang yang sudah mampu menikah dan takut diri dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dirinya kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah. Jika hawa nafsu tidak bisa dikendalikan lagi, sedangkan ia tidak mampu menafkahi isterinya, maka Allah Swt. akan melapangkan rizkinya. Hal tersebut sesuai dengan apayang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan menjadi wajib jika calon pengantin sudah mampu secara finansial dan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan serta yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah, serta khawatir dirinya terjerumus perbuatan zina.

2. Sunah

Menikah hukumnya sunah bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini, maka menikah lebih baik baginya daripada membujang, karena membujang (seperti pendeta) tidak diperbolehkan dalam Islam (Al Hamdani, 2002). Larangan membujang tersebut secara jelas telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “*Dari Samrah, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang membujang*”. (HR. Ibnu Majah).

Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi jika tidak kawin akan dikhawatirkan akan berbuat zina maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah.

3. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban hidup berumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan nafkah batin, seperti menggauli istrinya. Menikah juga haram bagi orang yang berniat ingin menyakiti perempuan yang dikawininya. Maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan haram hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. (Al Hamdani, 2002)

4. Makruh

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum pantas dan belum berkeinginan untuk menikah serta tidak memiliki bekal untuk menikah. Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segi materiil tapi lemah secara batin. Seperti orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai naluri syahwat yang kuat. Imam As-Syafi'i juga menerangkan bahwa

nikah hukumnya makruh bagi orang yang belum membutuhkan karena faktor genetik atau faktor lain seperti sakit, lemah, dan dia tidak punya biaya. Karena jika dipaksakan, pernikahan hanya mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, padahal dia membutuhkan (Zuhaili, 2010)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi orang tersebut tidak punya penghasilan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniah. Sementara calon istrinya rela dan memiliki harta cukup untuk menghidupi mereka. Dengan kondisi seperti itu, maka hukum pernikahannya dalam Islam dipandang makruh, yakni tidak dianjurkan atau tidak disukai.

5. Mubah

Nikah hukumnya mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk melakukan perkawinan (Sayyid Sabiq 2008). Seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, zalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah. Tidak ada pula dorongan maupun hambatan untuk melakukan atau meninggalkan pernikahan. Dalam keadaan ini, hukum menikah bagi seseorang tersebut yakni boleh atau mubah, yang artinya tidak berdosa dan tidak pula berpahala apabila dilakukan.

B. Rukun Nikah

Selanjutnya, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut Jumhur Ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam,
 - b. Laki-laki,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat memberikan persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam,
 - b. Perempuan,
 - c. Jelas orangnya,
 - d. Dapat dimintai persetujuan,
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki,
 - b. Dewasa,
 - c. Mempunyai hak perwalian,
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki,
 - b. Hadir dalam ijab qabul,
 - c. Dapat mengerti maksud akad,
 - d. Islam,
 - e. Dewasa.
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai,
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut,
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung,
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah,
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

C. Syarat Nikah

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Adapun syarat-syarat perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 (enam belas) tahun. Dan dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan”. (Djoko Prakoso, 1987)

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mangasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Apabila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “To Guide” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Secara terminologis menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 1995)

W.S Wingkel juga menjelaskan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang/kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-

pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian dari ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pendampingan kepada seseorang atau kelompok, yang dilakukan oleh seorang ahli. Bimbingan tersebut dalam bentuk pendampingan psikis/batin, bukan pendampingan fisik yang dimana pendampingan itu diarahkan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan perkawinan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga diliputi rasa tentram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah dengan menggunakan lafadz tertentu. Dengan demikian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "prevent". Artinya mencegah terjadinya/munculnya problem pada diri seseorang.

B. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Melakukan atau merencanakan berbagai macam hal di masa depan adalah tujuan dari bimbingan itu sendiri. Dengan adanya bimbingan setiap orang mampu untuk mengenali potensi dirinya, sehingga kita dapat mengembangkan potensi kita dan meningkatkan kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Demikian pula bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin mengenai pernikahan mempunyai tujuan tertentu, yaitu:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan perkawinan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat perkawinan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan perkawinan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan
 - e. Membantu individu melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan rumah tangganya, antara lain dengan:
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam

3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan:
 - a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - b. Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
 - c. Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dan rumah tangga menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pencegahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan perkawinan ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik.

C. Unsur-unsur Bimbingan Perkawinan

Unsur-unsur pelaksanaan bimbingan pra-nikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten atau Kota dan KUA Kecamatan serta Badan atau Lembaga yang melaksanakan kegiatan bimbingan Pra-nikah yang meliputi empat unsur sebagai berikut;

Pertama, Jam Pelajaran (JPL) Bimbingan pra-nikah adalah pembekalan singkat (short course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 16 jam pelajaran (JPL) Selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki peserta.

Adapun materi bimbingan pranikah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Kelompok Dasar
 - a. Kebijakan kementerian agama tentang pembinaan keluarga sakinah.
 - b. Kebijakan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan pra nikah.
 - c. Peraturan perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga.
 - d. Hukum munahakat.
 - e. Prosedur pernikahan
2. Kelompok Inti
 - a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga.
 - b. Merawat cinta kasih dalam keluarga.
 - c. Manajemen konflik dalam keluarga.
 - d. Psikologi perkawinan dan keluarga.

3. Kelompok Penunjang
 - a. Pendekatan Andragogi.
 - b. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching.
 - c. Pre Test dan Post Test.
 - d. Penugasan dan rencana aksi materi di atas dapat disampaikan dengan menggunakan metode ceramah, dialog, tanya jawab, simulasi, dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Kedua, narasumber-narasumber atau penasehat yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tertentu. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (Profesional) sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan dan peraturan agama islam mengenai pernikahan dan kehidupan rumah tangga.
2. Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islam.
3. Memahami landasan filosofi bimbingan.
4. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.
5. Selain kemampuan dan keahlian tersebut, tentu saja pelaksana dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut dengan kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik dan sebagainya). Dan kemampuan pribadi (mempunyai akhlak yang mulia). Narasumber yang bertugas memberikan materi dalam bimbingan pranikah terdiri dari berbagai bidang yang meliputi: Konsultasi keluarga, Tokoh Agama, Psikolog, dan Profesional di bidangnya.

Ketiga, metode bimbingan pra-nikah. Istilah metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara terminologi metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif maksudnya adalah antara biaya, tenaga dan waktu berjalan beriringan dan seimbang, sementara efisien adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian suatu hasil. Metode juga didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk menyampaikan sesuatu. Adapun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode yang digunakan adalah ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, serta studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan.

D. Asas-asas Bimbingan Perkawinan

Pada prinsipnya bimbingan keluarga Islam bersumber pada Al- Qur'an dan Hadits. Asas adalah landasan yang dijadikan pegangan atau pedoman. Adapun asas-asas bimbingan konseling perkawinan dan keluarga Islam antara lain:

1. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan perkawinan ditunjukkan pada upaya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam hal ini kebahagiaan di dunia harus dijadikan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia

dan akhirat yang ingin di capai itu bukan hanya untuk seseorang anggota keluarga, melainkan untuk semua anggota keluarga. Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 201. *Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka (Q.S al-Baqarah : 201)*

2. Asas Sakinah, Mawadah dan Warahmah

Perkawinan dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang “sakinah mawadah warahmah” keluarga yang tentram penuh kasih dan sayang. Dengan demikian bimbingan dan konseling perkawinan berusaha membantu individu untuk menciptakan kehidupan perkawinan dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan firman Allah surat ar-Ruum ayat 21: *Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.Sar- Ruum ayat 21)*

3. Asas Komunikasi dan Musyawarah

Ketentuan keluarga yang didasari rasa kasih sayang akan tercapai manakala dalam keluarga itu senantiasa ada komunikasi dan musyawarah. Bimbingan konseling perkawinan dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah yang dilandasi rasa saling hormat menghormati dan disinari rasa kasih sayang, sehingga komunikasi akan dilakukan dengan lemah lembut. Asas komunikasi dan musyawarah penting dijalankan sebagai upaya mencegah munculnya problem bahkan kalau perlu ada pihak ketiga yang dipercaya oleh semua pihak menjadi juru damai diantara mereka.

4. Asas Sabar dan Tawakal

Setiap orang menginginkan kebahagiaan dengan apa yang dilakukannya, termasuk dalam menjalankan perkawinannya. Namun tidak selamanya segala usaha ikhtiar manusia itu hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, maka orang harus senantiasa bersabar dan bertawakkal (berserah diri) kepada Allah. Dengan adanya bimbingan maka membantu individu untuk sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi masalah perkawinannya, sebab dengan bersabar dan tawakkal akan memperoleh kejernihan dalam berfikir agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

5. Asas Manfaat (maslahat).

Islam banyak memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap berbagai problem perkawinan. Dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dahulu, diharapkan pintu pemecahan masalah perkawinan dapat berkiblat pada mencari manfaat maslahat yang sebesar-besarnya. Sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 128. *Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak*

acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S an-Nisa : 128).

E. Peran KUA dalam Bimbingan Perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi di bawah Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas tertentu yang berkaitan dengan urusan agama Islam di wilayah kecamatan dalam Kabupaten. (Muhammad Qustulani). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga utama yang bertanggung jawab melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kementerian Agama di berbagai daerah. Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana pembinaan keluarga sakinah dan sebagai pencegah rusaknya hubungan rumah tangga sangatlah penting. Karena peranan itulah Kantor Urusan Agama (KUA) memosisikan keberadaannya sebagai sarana informasi dan juga edukasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di wilayah Kecamatan.

Dalam upaya meminimalisir kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan menurunkan angka perceraian yang terjadi, Kementerian Agama telah menerapkan program bimbingan perkawinan yang wajib bagi semua pasangan yang akan menikah. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pembentukan keluarga yang sejahtera. Penyelenggaraan bimbingan perkawinan dituangkan dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang menjadi pedoman pada program ini. Bimbingan perkawinan ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik kepada calon pengantin mengenai manajemen keluarga yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam kehidupan berkeluarga, mereka dapat menciptakan keharmonisan serta menjadi keluarga yang penuh cinta dan kasih, sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Terciptanya peraturan tentang bimbingan perkawinan calon pengantin ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keutuhan keluarga dan terwujudnya keluarga yang sakinah. Diharapkan dengan adanya program ini pasangan calon pengantin mempunyai bekal dan wawasan seputar keluarga dan rumah tangga, sehingga para calon pengantin dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Bimbingan merupakan Program Kegiatan Nasional (Proknas) yang pada tahun 2020 akan dijadikan sebuah program wajib dalam memenuhi rangkaian administrasi perkawinan. Terdapat sebuah sertifikat yang didapatkan bagi calon pengantin yang sudah mengikuti Bimwin secara penuh, akan tetapi faktanya banyak para calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin dengan alasan tidak ada izin dari tempat calon pengantin bekerja. Selain itu anggaran Bimwin yang masih belum dapat dipastikan, menyebabkan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di waktu dekat

tidak bisa melangsungkan pernikahannya dikarenakan belum mengikuti Bimwin. Hal ini masih menjadi problematika dalam rencana tindak lanjut adanya program Bimbingan.

Program bimbingan Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Ia merupakan sebuah kegiatan pembekalan kepada para calon pengantin guna menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan meminimalisir adanya perceraian. (Abdur Ro'uf Hasbullah, 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam bimbingan perkawinan. Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam bimbingan perkawinan memiliki tugas dalam menyelenggarakan serta membantu bimbingan perkawinan dengan mempersiapkan semua proses bimbingan perkawinan yang dimulai dari persiapan hingga pelaksanaannya. Mempersiapkan serta mengatur agenda dari mulai pendaftaran nikah sampai dengan dilaksanakannya bimbingan perkawinan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh calon pengantin adalah mendaftarkan dan menyerahkan semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Langkah pertama yang dilakukan para calon mempelai ialah datang ke RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan. Setelah itu mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke Kantor Urusan Agama kecamatan. Jika perkawinan dilakukan di luar Kantor Urusan Agama maka KUA kecamatan mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat akad nikah, kemudian menuju ke Kantor Camat guna mohon izin menikah jika kurang dari 10 hari kerja. (Ita Musarrofa, 2014).

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, memiliki peran untuk melakukan penjadwalan kegiatan bimbingan perkawinan agar kegiatan bimbingan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kemudian melakukan konfirmasi kepada masing-masing fasilitator yang nantinya akan menyampaikan materi-materi tentang bimbingan perkawinan. Pada saat bimbingan perkawinan, Kepala KUA juga menyampaikan materi kepada calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, yaitu tentang bagaimana tata cara membangun keluarga yang utuh. Kemudian Penyuluh Keluarga Sakinah menyampaikan materi tentang keluarga sakinah, dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan buku dari Kemenag yaitu buku pedoman keluarga sakinah. peserta bimbingan perkawinan juga akan mendapatkan piagam dalam bentuk sertifikat bimbingan perkawinan, yang sudah bertanda tangan pegawai. Sertifikat bimbingan perkawinan tersebut sebagai bukti bahwa sudah mengikuti bimbingan perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengikuti bimbingan perkawinan, karena didalam bimbingan tersebut pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sudah melakukan kerjasama dengan pihak Puskesmas agar menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dan imunisasi Tetanus (TT).

Bimbingan perkawinan ialah proses pemberian bantuan terhadap individu, sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga dan memberikan petunjuk untuk

dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta disimpulkan bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah. Adapun materi bimbingan di KUA meliputi:

1. Al-Qur'an

Dalam rangkaian materinya, salah satu yang wajib dilakukan oleh para pasangan calon pengantin adalah mengikuti tes baca Al-Qur'an. Wajib bagi setiap muslim untuk dapat bisa membaca Al-Qur'an sekalipun mereka yang akan melangsungkan pernikahan.

2. Psikologi Keluarga

Bimbingan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) memang tidak secara langsung membahas psikologi keluarga, tetapi ada beberapa materi yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, seperti:

- a. Membangun landasan keluarga sakinah,
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh,
- c. Dinamika perkawinan,
- d. Kebutuhan keluarga,
- e. Kesehatan keluarga,
- f. Membangun generasi yang berkualitas,
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tangguh dan di dalamnya setiap anggota menemukan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Keluarga sakinah tidak lain adalah keluarga yang bahagia lahir batin, penuh cinta kasih dan saling memahami. Keluarga sakinah dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak dengan pembentukan karakter anggota keluarga dengan baik. Keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu solusi efektif untuk membuat seorang istri dan anak merasa nyaman, damai, tentram di rumah.

4. Fardhu Ain/Fiqih Munakahat

KUA memberikan materi Fiqih Munakahat dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Fiqih Munakahat adalah aturan hukum yang mengatur pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan berumah tangga.

Materi Fiqih Munakahat diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman tentang dunia perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Tujuannya agar calon pengantin dapat merencanakan masa depan yang lebih baik dan menikah di usia yang matang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga.

KESIMPULAN

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian. Melalui bimbingan ini, calon suami istri diharapkan untuk bisa memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing sehingga dapat membangun kualitas hubungan. Selain itu, bimbingan ini juga dapat membantu calon pengantin memahami hakikat dan tujuan pernikahan menurut agama masing-masing, sehingga jalannya kehidupan rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan hukum dan agama. Bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk menjaga ketahanan keluarga atau efektif dalam membentuk keluarga sakinah, namun bimbingan perkawinan tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kalau ikut bimbingan perkawinan pasangan bisa langgeng sampai tua dalam perkawinannya, akan tetapi bimbingan perkawinan ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Setidaknya dengan mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan ini pasangan yang akan menikah mampu membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah serta memiliki wacana untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Abdul Haris Na'im, *Fiqih Munakahat*, (Kudus: Stain Kudus, 2011).
- Abdur Ro'uf Hasbullah, *Sertifikat Perkawinan Analisis Maqāṣid Al-Syari'ah dan Masalah Mursalah*. (IAIN Kediri, 2018)
- Dede Nurul Qomariah dkk, *Implementasi Program Bimwin Di Kota Tasikmalaya*, (Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls 6, No. 1, 2021).
- Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, no. 1836. (Beirut: DaralKutub'Ilmiyah, 2004)
- Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, Qahirah: Darussalam, 1999).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma, 2009)
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin*, 2018.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982).
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).
- Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama* (Tangerang: PSP Press, 2018).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pun di Aksara, 2008)

Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, *Tentang Perkawinan*.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis*, Jilid 2, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet.I, (Jakarta: Almahira, 2010).

Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).